

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *INEFFECTIVE MONITORING*,
WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP *FRAUDULENT FINANCIAL
STATEMENT*
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri di BEI Periode
2019-2023)**

Margareta Evania Susanto¹

Theresia Dwi Hastuti²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata^{1,2}

e-mail: 21g10038@student.unika.ac.id¹; theresia@unika.ac.id²

ABSTRACT

Companies often provide information that deviates from the facts in order to beautify financial reports and in the end the facts about financial reports are often not presented based on the actual facts. This study discusses the factors that influence fraudulent financial statements by examining independent variables, namely the proportion of independent commissioners, audit committee competence, ineffective monitoring, and whistleblowing systems carried out in manufacturing companies in various industrial sectors in 2019-2023. This type of research is quantitative research, the sampling method uses the purposive sampling method. This research was conducted in order to help companies find effective ways to avoid fraud in financial reports. The test results of the variables of the proportion of independent commissioners, audit committee competence, and whistleblowing system have an influence on preventing fraudulent financial reports and the ineffective monitoring variable affects the emergence of fraudulent financial reports.

Keyword: *The proportion of independent commissioners, the competency of the audit committee, ineffective monitoring, whistleblowing system, fraudulent financial statement*

ABSTRAKSI

Perusahaan seringkali memberikan informasi yang menyimpang dari fakta guna mempercantik laporan keuangan dan pada akhirnya fakta mengenai laporan keuangan seringkali tidak disajikan berdasarkan fakta sebenarnya. Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *fraudulent financial statement* dengan mengkaji variabel independen, yaitu proporsi komisaris independen, kompetensi komite audit, *ineffective monitoring*, dan *whistleblowing system* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri tahun 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan menemukan cara yang efektif guna penghindaran munculnya kecurangan pada laporan keuangan. Hasil uji variabel proporsi komisaris independen, kompetensi komite audit, dan *whistleblowing system* memiliki pengaruh pada pencegahan terjadinya kecurangan laporan keuangan dan variabel *ineffective monitoring* memengaruhi pada munculnya kecurangan laporan keuangan.

Kata Kunci: *Proporsi komisaris independen, kompetensi komite audit, ineffective monitoring, whistleblowing system, fraudulent financial statement*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah salah satu alat yang dipakai perusahaan untuk menunjukkan gambaran kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu (Lestari & Henny, 2019). Biasanya, laporan keuangan memuat informasi dan aktivitas yang terjadi di perusahaan selama periode tersebut, informasi-informasi tersebut tentunya harus berdasarkan fakta dan sebenar-benarnya. Tetapi pada kenyataannya laporan keuangan seringkali tidak disajikan berdasarkan fakta sebenarnya, perusahaan seringkali memberikan informasi yang menyimpang dari fakta guna menarik perhatian para pengguna laporan keuangan terutama investor (Ndruru & Hutapea, 2022). Indonesia berada pada urutan ke empat besar sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di dunia pada tahun 2022, dan terdapat 239 kasus dengan 64,4% kasus korupsi, 28,9% kasus penyalahgunaan aset, 6,7% kasus kecurangan laporan keuangan (ACFE Indonesia, 2020). Dampak yang dihasilkan dari berbagai kasus *fraudulent financial statement* memberikan efek kerugian yang cukup signifikan bagi perusahaan diberbagai jenis sektor industri. Salah satunya adalah industri manufaktur, perusahaan manufaktur memiliki siklus yang panjang, ruang lingkup yang luas bahkan kebutuhan sumber daya manusia yang cukup banyak sehingga potensi perusahaan untuk mengalami tindakan *fraudulent financial statement* cukup tinggi.

Salah satu kasus *Fraudulent financial statement* yang terjadi adalah kasus PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) yang melakukan kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan tahun 2017, dikarenakan turunnya saham AISA yang disebabkan oleh pengepulan beras petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium yang dilakukan oleh anak perusahaan PT TPS Food yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) mengepul. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2018, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan tahun 2017 (Wareza, 2019).

Kasus *fraudulent financial statement* timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi menyoroti potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* seringkali bertindak sesuai kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan kepentingan yang seharusnya mereka jalani yaitu kepentingan perusahaan (Meckling & Jensen, 1976). Teori agensi memberikan penjelasan mengenai tindakan yang menguntungkan diri sendiri dari sisi manajer atau karyawan (Kholmi, 2017). Pada perusahaan hal tersebut sering terjadi dikalangan *agent*, mereka melakukan tindakan yang ilegal karena berbagai alasan untuk

mencapai tujuan mereka seperti memperoleh *reward* dari pemilik perusahaan atau tindakan manajer atau karyawan yang menyalahgunakan aset demi keuntungan pribadi (Craja *et al.*, 2020).

Penerapan GCG yang optimal menjadi salah satu kunci pencegahan kasus *fraudulent financial statement* yang dilakukan *agent*. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang terdiri dari struktur, aturan dan proses itu sendiri, bertujuan guna menciptakan suatu tatanan agar dapat mengatur dan mengambil alih dunia usaha secara terstruktur guna memenuhi hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam arti luas (Andayani & Wuryantoro, 2023). Pada suatu perusahaan diperlukannya penerapan GCG agar perusahaan tersebut dikelola dengan baik, efisien, profesional, dan tidak memberikan kerugian bagi kepentingan *stakeholders* (Suwandi *et al.*, 2019). Ndruru & Hutapea (2022) menyatakan bahwa GCG mampu mencegah terjadinya *fraudulent financial statement* karena dinilai mampu untuk menekan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan.

Salah satu wujud penerapan GCG di perusahaan adalah peran proporsi dewan komisaris dalam pencegahan *fraudulent financial statement*, hal ini dikarenakan pengawasan akan efektif jika proporsi dewan komisaris independen dan dewan komisaris perusahaan berada pada jumlah yang sama (Angelina & Chariri, 2022). Saat menjalankan perannya, independensi merupakan sikap yang harus dimiliki dewan komisaris independen serta sifat profesionalisme dan sifat kepemimpinan (Prasetyo & Primasari, 2021). Objektivitas dan netralitas akan dapat tercapai dengan adanya dewan komisaris independen, dikarenakan mereka merupakan pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan, sehingga tidak ada tekanan yang mereka peroleh dan tindakan *fraudulent financial statement* dapat tercegah (Wahyudi & Dewatanto, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Rostami & Rezaei (2022), Aprilia & Furqani (2021), Wahyudi & Dewatanto (2023) yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen memberikan dampak guna pencegahan *fraudulent financial statement* disuatu perusahaan, namun tidak sejalan dengan beberapa penelitian menyatakan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak pada *fraudulent financial statement* (Wahyudi *et al.*, 2022; Fouziah *et al.*, 2022).

Di sisi lain dalam upaya menanggulangi kasus *fraudulent financial statement* kompetensi komite audit menjadi salah satu hal yang cukup penting. Salah satu tugas komite audit untuk mencegah terjadinya *fraudulent financial statement* adalah dengan mengawasi bagaimana manajemen melaporkan keuangan (Kusumawardani *et al.*, 2024). Keefektifan komite audit dalam menjalankan tugas terlihat dari seberapa besar

kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Semakin berkompeten maka hal tersebut akan memengaruhi mereka dalam pengawasan yang mereka lakukan sehingga akan mampu meminimalisir terjadinya *fraudulent financial statement*. Berdasarkan penelitian Kusumawardani *et al.* (2024) dan Nurliasari & Achmad (2020) menyatakan kompetensi komite audit memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial statement*, namun pada penelitian Kardhianti & Srimidiarti (2022) dan Luthfiyyah & Dongoran (2024) kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Kasus *fraudulent financial statement* juga dipicu dari kurangnya monitoring dewan komisaris yang diberikan untuk suatu perusahaan yang akhirnya memunculkan *ineffective monitoring*, kondisi ini akan menghasilkan hasil yang tidak efektif. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu kelemahan yang menyebabkan munculnya kasus *fraud* (ACFE Indonesia, 2020). Salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi dan mendeteksi tindakan *fraud* adalah monitoring (ACFE Indonesia, 2017). Meningkatnya tindakan kecurangan menjadi salah satu bentuk dari lemahnya monitoring yang dimiliki suatu perusahaan dan akhirnya menghasilkan peluang guna bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (Belinda & Machmuddah, 2024). Berdasarkan penelitian Agusputri & Sofie (2019), Aprilia & Furqani (2021), dan Istikhoroh *et al.* (2021) menyatakan *ineffective monitoring* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial statement*, namun pada penelitian Sinarti & Nuraini (2019) dan Achmad *et al.* (2022) *ineffective monitoring* tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraudulent financial statement*.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, *whistleblowing system* menjadi sarana pencegahan tindakan *fraud* yang terjadi didalam suatu perusahaan. Berdasarkan survei *Fraud 2019*, *Whistleblowing system* merupakan sarana pencegahan *fraud* yang cukup efektif (ACFE Indonesia, 2020). Pada penelitian Prena & Kusmawan (2020), Rahmi *et al.* (2024) dan Riyanto & Arifin (2022) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki potensi yang signifikan guna mencegah terjadinya tindakan *fraudulent financial statement*, namun pada penelitian Suprpto & Agustia (2023) dan Putri *et al.* (2024) menyatakan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang pengaruh GCG dan *ineffective monitoring* terhadap *fraudulent financial statement* dan menambahkan variabel *whistleblowing system*. Penerapan *whistleblowing system* mampu mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit, pengawasan yang mereka lakukan dapat

menjadi efektif dan optimal dan mampu mendeteksi dan mencegah *fraudulent financial statement* yang dilakukan *agent*. *Whistleblower* memiliki potensi untuk memberikan informasi tentang kecurangan yang dilakukan oleh *agent* kepada pihak yang berkepentingan, seperti dewan direksi atau otoritas pengatur (Potipiroon & Wongpreedee, 2020). Pada konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menjadi penghambat pelaporan langsung ke pihak berwenang, *whistleblower system* dapat menjadi perantara yang efektif guna memperbaiki ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Meckling dan Jensen pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara pihak *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki keterikatan pada penyelesaian dua masalah yang dapat muncul dalam hubungan agensi, permasalahan keagenan yang pertama adalah mengenai (a) keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* bertentangan, dan (b) *principal* merasa kesulitan atau perlu mengeluarkan biaya yang mahal guna memverifikasi tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh *agent* (Meckling & Jensen, 1976). Teori agensi memberikan penjelasan mengenai tindakan yang menguntungkan diri sendiri dari sisi manajer atau karyawan (Kholmi, 2017).

Adanya perbedaan keinginan antara *agent* dan *principal* menjadi salah satu peluang terjadinya *fraudulent financial statement*. Peluang tersebut dapat dicegah dengan adanya GCG dalam sebuah perusahaan diantaranya proporsi dewan komisaris independen serta kompetensi komite audit, namun kembali lagi jika kurangnya pengawasan atau monitoring juga dapat memicu *fraudulent financial statement*. Pencegahan *fraudulent financial statement* juga dapat dilakukan dengan *Whistleblowing system*, dimana seseorang dapat melaporkan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh *agent*.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Fraudulent financial statement*

Teori agensi menggambarkan hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan *agent* wewenang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Teori ini menyoroti konflik kepentingan yang mungkin timbul antara kedua pihak tersebut (Meckling & Jensen, 1976). Komisaris independen tidak berhubungan dengan pihak

internal perusahaan secara langsung, hal ini membuat mereka dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan netral. Berdasarkan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 57 Tahun 2017 Pasal 19 ayat 2 proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan harus terdiri lebih dari 2 orang dan jumlah persentase paling rendah Dewan Komisaris independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Semakin tinggi proporsi komisaris independen akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan kepada *agent*, sehingga akan dapat mengurangi peluang terjadinya *fraudulent financial statement*. Komisaris independen dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindakan manipulatif karena komisaris independen tidak terlibat dalam operasional sehari-hari dan cenderung memiliki perspektif yang lebih objektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh *agent* (Wahyudi & Dewatanto, 2023). Objektivitas dan kenetralan dapat tercapai karena dewan komisaris independen tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun (Aprilia & Furqani, 2021).

H1a : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap *Fraudulent financial statement*.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Fraudulent financial statement*

Kemampuan komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan merupakan salah satu hal yang cukup penting (Beasley *et al.*, 2009). Pemahaman dan pengawasan proses pelaporan laporan keuangan akan menjadi lebih efektif jika Komite audit memiliki pengetahuan akuntansi dan Keuangan. Komite audit yang berkompeten akan mampu meminimalisir tindakan *fraud* yang dilakukan oleh *agent* (Nurliasari & Achmad, 2020). *Agent* memiliki insentif yang dapat digunakan untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan *principal*, maka dengan adanya komite audit yang berkompeten akan mampu mencegah tindakan *fraudulent financial statement* yang dilakukan oleh *agent*. Kompetensi komite audit merupakan kemampuan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada *agent*, adanya sikap skeptis akan menjadikannya lebih efektif dalam melakukan evaluasi laporan keuangan, seperti pengecekan dan mendeteksi hal yang mencurigakan atau anomali. Hal ini menyebabkan ketika perusahaan memiliki banyak komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi, pemegang saham akan merasa terjamin akan laporan keuangan yang dilaporkan, karena memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat sehingga laporan keuangan dapat disajikan akurat dan bebas dari *fraudulent financial statement* (Kusumawardani *et al.*, 2024).

H1b: Kompetensi Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap *Fraudulent financial statement*.

Pengaruh *Ineffective monitoring* Terhadap *Fraudulent financial statement*

Ineffective monitoring adalah suatu kondisi munculnya *fraud* yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau monitoring yang akhirnya memunculkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan yang dilakukan oleh *agent* (Utami *et al.*, 2022). Salah satu aspek yang berkaitan dengan teori agensi adalah konsep monitoring yang efektif, mencakup pengawasan terhadap tindakan manajemen (*agent*) untuk memastikan bahwa *agent* telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Frekuensi rapat dewan komisaris yang kecil merupakan salah satu wujud *Ineffective monitoring* (Kaituko *et al.*, 2023). Ketika *ineffective monitoring* terjadi *agent* memiliki kesempatan untuk melakukan *Fraudulent financial statement* (Agusputri & Sofie, 2019). Kurangnya pengawasan yang efektif dapat memicu timbulnya celah untuk terjadinya kecurangan (Lestari & Henny, 2019). Praktik kecurangan dapat ditekan dengan memberikan pengawasan yang optimal (Aprilia & Furqani, 2021). *Agent* yang memiliki insentif untuk bertindak sesuai kepentingan pribadinya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercantik laporan keuangan, yang akhirnya merugikan prinsipal dan pihak lain yang bergantung pada informasi keuangan perusahaan.

H2: *Ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *Fraudulent financial statement*.

Pengaruh *Whistleblowing system* Terhadap *Fraudulent financial statement*

Whistleblowing system adalah sistem pelaporan pada perusahaan atau organisasi yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum, norma, atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Rahmi *et al.*, 2024). Perusahaan menyediakan program dengan memberikan peluang dan mendorong *agent* guna melaporkan tindakan kecurigaan akan tindakan *fraud* sebagai tindakan inisiatif anti-*fraud* (Riyanto & Arifin, 2022). Pelaporan yang cepat dan tepat akan dapat membantu perusahaan mengindikasikan kecurangan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau korektif yang diperlukan untuk mengurangi risiko *fraudulent financial statement* (Prena & Kusmawan, 2020). *Whistleblowing system* dapat menjadi salah satu sistem yang efektif dalam menjaga integritas pelaporan keuangan perusahaan dan menurunkan dampak negatif yang timbul dari konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, yang dimana *agent* seringkali bertindak sesuai kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*, termasuk dalam hal pelaporan keuangan.

H3 : *Whistleblowing system* berpengaruh Negatif terhadap *Fraudulent financial statement*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019–2023. Metode sampling purposive digunakan untuk memilih sampel penelitian, yaitu dengan menyaring sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur sektor aneka industri dan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023 serta memiliki potensi untuk melanjutkan laporan keuangan.
2. Annual Report perusahaan dapat diakses melalui website idx

Model persamaan berikut digunakan untuk menganalisis pengaruh *fraudulent financial statement* terhadap *good corporate government*, *ineffective monitoring*, *whistleblowing system*.

$$FRAUD = \alpha + \beta_{1a} \text{ PDKI} + \beta_{1b} \text{ KKA} + \beta_2 \text{ IM} + \beta_3 \text{ WBS}$$

FRAUD menggunakan variabel *dummy*. Pada perusahaan yang terindikasi melakukan *fraudulent financial statement* diberikan angka 1, dan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan *fraudulent financial statement* diberikan angka 0.

β_{1a}	: Koefisien Regresi Proporsi Dewan Komisaris Independen
β_{1b}	: Koefisien Regresi Kompetensi Komite Audit
β_2	: Koefisien Regresi <i>Ineffective monitoring</i>
β_3	: Koefisien Regresi <i>Whistleblowing system</i>
PDKI	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
KKA	: Kompetensi Komite Audit
IM	: <i>Ineffective monitoring</i>
WBS	: <i>Whistleblowing system</i>
ε	: Standard Error

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Rumus	Sumber
<i>Fraudulent financial statement</i>	Beneish M-Score: Jika nilai <i>M-Score</i> > -2,22 maka, perusahaan dikelompokkan dalam perusahaan yang terindikasi melakukan <i>fraudulent financial statement</i> diberi kode "1" dan jika nilai <i>M-Score</i> < -2,22 maka, perusahaan dikelompokkan dalam perusahaan yang tidak terindikasi melakukan <i>fraudulent financial statement</i> diberi kode "0".	Mardianto & Tiono, 2019
Komisaris Independen	$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Anggota Komisaris Independen}}{\sum \text{Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Wahyudi & Dewatanto, 2023
Kompetensi Komite Audit	$\text{Kompetensi Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota yang berkompentensi di bidang audit}}{\text{Jumlah anggota komite audit keseluruhan}}$	Kusumawardani <i>et al.</i> , 2024)
<i>Ineffective monitoring</i>	$\text{Kehadiran rapat} = \frac{\text{Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris}}{\text{Jumlah Rapat Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Istiyanto & Yuyetta, 2021
<i>Whistleblowing system</i>	Variabel <i>Dummy</i> : Jika perusahaan menggunakan <i>whistleblowing system</i> maka akan diberi Kode "1" dan Jika perusahaan tidak menggunakan <i>whistleblowing system</i> maka akan diberi Kode "0".	(Sugita & Khomsiyah, 2023)

PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Proporsi Dewan Komisaris Independen	136	0,20	0,75	0,4185	0,11105
Kompetensi Komite Audit	136	0,33	1,00	0,9521	0,16659
<i>Ineffective monitoring</i>	136	0,30	1,00	0,9350	0,13083
Valid N (listwise)	136				

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil uji pada tabel 2 menunjukkan penelitian ini menggunakan 136 sampel. Rata-rata untuk variabel proporsi dewan komisaris independen adalah 0,4185, yang berarti rata-rata dewan komisaris independen pada sampel penelitian adalah sebesar 41,85%, berdasarkan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 57 Tahun 2017 Pasal 19 ayat 2, jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang maka jumlah presentase paling rendah dewan komisaris independennya adalah 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017). Dengan rata-rata di atas 30%, hal ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris memiliki tingkat independensi yang tinggi dalam mengawasi perusahaan. Untuk variabel kompetensi komite audit, rata-ratanya

sebesar 0,9521, hal ini memiliki arti bahwa kompetensi komite audit pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang diteliti mencapai 95,21%. Nilai rata-rata yang tinggi ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan tugas yang dijalankan oleh komite audit dapat berjalan dengan efektif karena mereka berkompeten dan memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraudulent financial statement* (Kusumawardani *et al.*, 2024). Variabel *ineffective monitoring* memiliki rata-rata sebesar 0,9350. Hal ini berarti tingkat kehadiran rapat dewan komisaris pada perusahaan manufaktur di sektor aneka industri yang diteliti mencapai 93,50%.

Tabel 3. Frekuensi *Fraudulent financial statement* dan *Whistleblowing system*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terdapat Kecurangan Pada Laporan Keuangan	42	30,9	30,9	30,9
	Tidak Terdapat Kecurangan Pada Laporan Keuangan	94	69,1	69,1	100
	Total	136	100	100	
Valid	Menggunakan <i>Whistleblowing system</i>	121	89	89	89
	Tidak Menggunakan <i>Whistleblowing system</i>	15	11	11	100
	Total	136	100	100	

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa 42 perusahaan, atau 30,9% dari total 136 data perusahaan manufaktur sektor aneka industri, mengalami *fraudulent financial statement*. Sementara itu, 94 perusahaan lainnya, atau 69,1%, tidak mengalami *fraudulent financial statement*. Pada tabel 3 juga menunjukan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang menggunakan *whistleblowing system* adalah sebanyak 121 atau 89 % dari 136 keseluruhan total data. Sedangkan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak menggunakan *whistleblowing system* adalah sebanyak 15 atau 11 % dari 136 keseluruhan total data.

Tabel 4. Hasil Matriks Klasifikasi

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		<i>Fraudulent financial statement</i> ,00	1,00		
Step 1	<i>Fraudulent financial statement</i>	0,00	91	3	96,8
		1,00	36	6	14,3
Overall Percentage					71,3

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil uji matriks klasifikasi menunjukkan bahwa model mampu mengestimasi perusahaan manufaktur sektor aneka industri tanpa *fraudulent financial statement* (0,00) sebesar 96,8 %, dan perusahaan manufaktur sektor aneka industri dengan *fraudulent financial statement* (1,00) sebesar 14,3 % dari total 136 sampel. Ketepatan model mengestimasi *fraudulent financial statement* sebesar 71,3 %. Dari hasil uji matriks klasifikasi dapat diketahui bahwa model ini mampu memberikan estimasi munculnya *fraudulent financial statement* pada sampel penelitian dengan tingkat akurasi 71,3 %, atau 97 dari 136 sampel.

Tabel 5. Hasil Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4,291	7	0,746

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji Hosmer and Lemeshow, nilai chi-square yang diperoleh adalah 4,291, yang lebih kecil dibandingkan dengan chi-square tabel sebesar 14,067. Selain itu, tingkat signifikansi sebesar 0,746 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cocok dengan data dan dapat diandalkan untuk memprediksi nilai observasi.

Tabel 6. Hasil uji -2 Log Likelihood Step 0 dan Step 1

Iteration	-2 Log Likelihood	
Step 0	1	168,187
	2	168,138
	3	168,138
Step 1	1	148,633
	2	145,066
	3	144,643
	4	144,632
	5	144,632
	6	144,632

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji *overall test* pada tabel 6 *step 0* menunjukkan nilai *-2 Log Likelihood Block Number* = 0 sebesar 168,138, lalu uji *overall test step 1* dalam tabel 8 menunjukkan nilai *-2 Log Likelihood* = 1 adalah sebesar 144,632. Berdasarkan tabel, nilai *-2 Log Likelihood* mengalami penurunan dari 168,138 menjadi 144,632 setelah variabel independen ditambahkan ke dalam model (*Block Number* = 1. Ini berarti bahwa model hipotesis sudah sesuai dengan data dan ada perbaikan setelah penambahan variabel independen.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

	Coefficient	Sig.	Hasil
Nagelkerke R Square	0,224		
Uji f (Chi-square)	23,506	0,000	
Uji t			
PDKI	-4,251	0,048	diterima
KKA	-3,125	0,016	diterima
WBS(1)	-1,794	0,028	diterima
IM	8,315	0,009	diterima
Constant	-3,897	0,266	

Sumber: Data Diolah, 2024

Dalam tabel 7 diketahui hasil uji koefisien determinasi nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,224 (22%). Dari hasil uji ini *fraudulent financial statement* dapat memberikan penjelasan melalui variabel-variabel independen sebesar 22% dan 78% sisanya dipaparkan oleh variabel lain yang tidak berasal dari model penelitian yang digunakan. Pengujian secara kelayakan model menunjukkan hasil *chi-square* sebesar 23,506 dimana hasil uji ini lebih tinggi dari pada *chi-square* tabel sebesar 9,488. Selain itu, tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti model layak untuk diteliti. Hasil yang ditunjukkan tabel 7 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$FRAUD = -3,897 - 4,251 \text{ PDKI} - 3,125 \text{ KKA} - 1,794 \text{ WBS} + 8,315 \text{ IM} + \epsilon$$

Berdasarkan hasil penelitian, variabel proporsi dewan komisaris independen menghasilkan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, dengan adanya hasil ini, maka H1a diterima. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen akan memberikan pengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Salah satu elemen penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mencegah tindakan kecurangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas perusahaan adalah dengan memiliki dewan komisaris yang efektif dan independen. Objektivitas dan netralitas akan dapat tercapai dengan adanya dewan komisaris independen dikarenakan mereka adalah pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan, sehingga

tidak ada tekanan yang mereka peroleh dan tindakan *fraudulent financial statement* dapat tercegah (Wahyudi & Dewatanto, 2023). Hal ini selaras dengan penelitian Rostami & Rezaei (2022), Aprilia & Furqani (2021) dan Wahyudi & Dewatanto (2023) yang menyatakan dewan komisaris independen akan dapat mengawasi kinerja *agent* dengan independen dan tidak bias, karena mereka tidak menerima tekanan dari pihak internal perusahaan. Hal ini dapat menurunkan peluang munculnya *fraudulent financial statement* yang dilakukan oleh *agent*.

Nilai signifikansi variabel kompetensi komite audit adalah $0,016 < 0,05$, dengan adanya hasil ini, maka H1b diterima. Tingginya kompetensi komite audit di suatu perusahaan dapat membantu mencegah terjadinya kasus *fraudulent financial statement*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kusumawardani *et al.* (2024) dan Nurliasari & Achmad (2020) yang menyatakan komite audit yang berkompeten akan mampu mencegah terjadinya *fraudulent financial statement*, hal ini dikarenakan mereka berkompeten untuk menjalankan tugas dan pengawasan yang mereka lakukan guna mencegah terjadinya *fraudulent financial statement*. Dengan adanya komite audit yang kompeten, penerapan praktik GCG dapat berlangsung dengan optimal. Kompetensi seorang auditor akan sangat berkaitan dengan opini yang akan dihasilkan dikarenakan dengan kompetennya suatu auditor maka pengetahuan yang dimilikinya akan digunakan untuk penentuan materialitas suatu laporan keuangan (Idawati & Eveline, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian nilai signifikansi yang dihasilkan *ineffective monitoring* adalah $0,028 < 0,05$, dengan adanya hasil ini, maka H2 diterima. Tingginya *ineffective monitoring* di suatu perusahaan dapat menyebabkan munculnya *fraudulent financial statement*. Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan teori agensi, yang melibatkan hubungan antara *agent* dan *principal* memiliki perbedaan tujuan dalam pencapaian target laba dan dengan tingginya *ineffective monitoring* akan dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan peluang bagi *agent* untuk dapat melakukan *fraud*, terutama financial statement *fraud*. Meningkatnya tindakan kecurangan menjadi salah satu bentuk dari lemahnya monitoring yang dimiliki suatu perusahaan dan akhirnya menghasilkan peluang guna bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (Belinda & Machmuddah, 2024). Hal ini didukung dengan penelitian Agusputri & Sofie (2019); Istikhoroh *et al.* (2021), dan Aprilia & Furqani (2021) yang menyatakan *ineffective monitoring* memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel *whistleblowing system* adalah $0,009 < 0,05$, berdasarkan hal ini maka H3 diterima. Hasil ini selaras dengan penelitian Prena & Kusmawan (2020), Rahmi *et al.* (2024), dan Riyanto & Arifin (2022) yang menyatakan

whistleblowing system mampu mencegah terjadinya *fraudulent financial statement*. Penerapan *whistleblowing system* akan mampu mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit, pengawasan yang mereka lakukan dapat menjadi efektif dan optimal dan mampu mendeteksi dan mencegah *fraudulent financial statement* yang dilakukan *agent*. *Whistleblowing system* dapat menjadi salah satu sistem pengendalian yang mampu menjaga integritas pelaporan keuangan perusahaan dan menurunkan dampak negatif yang timbul dari konflik kepentingan yang mungkin muncul menurut teori agensi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, kompetensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, *whistleblowing system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, dan *ineffective monitoring* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dan dewan direksi dalam pencegahan *fraudulent financial statement* dengan monitoring yang tinggi, baik dari pengawasan dewan komisaris independen serta komite audit yang berkompeten dan penerapan *whistleblowing system* serta pengawasan yang efektif guna pencegahan terjadinya *fraudulent financial statement*. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan pada jumlah sampel yang digunakan. Penelitian selanjutnya dapat meneliti sektor jasa, keuangan, dan lainnya guna memperoleh perbandingan dengan sektor lainnya. Selain hal tersebut, dapat menambahkan faktor eksternal seperti tekanan dari pemangku kepentingan, peraturan pemerintah yang memengaruhi munculnya *fraudulent financial statement*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia. (2017). Survei Fraud Indonesia 2016. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia. *Economies*, 10 (1), 13-16. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>.

- Agusputri, H., & Sofie, S. (2019). Faktor - Faktor yang Berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting dengan Menggunakan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14 (2), 105–124. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049>.
- Andayani, W., & Wuryantoro, M. (2023). Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Fraud Detection of Financial Statements. *International Journal of Professional Business Review*, 8 (5), e01051. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1051>.
- Angelina, T. N., & Chariri, A. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11 (4), 1-13.
- Aprilia, S. R. N. A., & Furqani, A. (2021). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Metode Fraud Diamond pada Perusahaan Jasa. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 2 (2), 1–11. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i2.1661>.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Neal, T. L. (2009). The Audit Committee Oversight Process*. *Contemporary Accounting Research*, 26 (1), 65–122. <https://doi.org/10.1506/car.26.1.3>.
- Belinda, N., & Machmuddah, Z. (2024). Kecurangan Laporan Keuangan dilihat dari Aspek Kondisi Keuangan dan Pengawasan Dewan Komisaris Independen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13 (1), 1. <https://doi.org/10.36080/jak.v13i1.2700>.
- Craja, P., Kim, A., & Lessman, S. (2020). Deep Learning for Detecting Financial Statement Fraud. *Decision Support Systems*, 139. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113421>.
- Fouziah, S., Suratno, S., & Djaddang, S. D. (2022). Relevansi Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Statement pada Perusahaan Sektor Perbankan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6 (1), 59–77. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1525>.
- Idawati, W., & Eveline, R. (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 20 (1), 16. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.73>.
- Istikhoroh, S., Sukandani, Y., Lasiyono, U., Utomo, S. P., & AC, E. A. (2021). Financial Target, External Pressure, and Ineffective monitoring: How do The Impacts on Financial Statement Fraud?. *Saudi Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.36348/sjef.2021.v05i09.001>.
- Istiyanto, A.S., & Yutetta, E.N.A. (2021). Analisis Determinan Financial Statement Fraud dengan Pendekatan Fraud Diamond (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016 – 2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10 (1), 1-12.

- Kardhianti, O.K., & Srimindarti, C. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4 (3), 961-981.
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board Structure and The Likelihood of Financial Statement Fraud. Does Audit Fee Matter? Evidence from Manufacturing Firms in The East Africa Community. *Cogent Business & Management*, 10 (2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>.
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2 (2), 357–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>.
- Kusumawardani, M., Soediro, A., & Adhitama, F. (2024). Peran Komite Audit terhadap Fraudulent Financial Reporting. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8 (2), 156-170. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i2.20367>.
- Lestari, M. I., & Henny, D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon terhadap Fraudulent Financial Statements pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6 (1), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i1.5274>.
- Luthfiyyah, A., Fitriana., & Dongoran, H. (2024). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 95-109. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v5i2.477>.
- Mardianto, & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*, 4 (1), 87–103. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3349>.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Ndruru, S. A. O., & Hutapea, J. Y. (2022). Pengaruh Ineffective Monitoring, Financial Stability, dan Corporate Governance, terhadap Financial Statement Fraud. *Jurnal Ekonomis*, 15 (2), 131–151. <https://doi.org/10.58303/jeko.v15i2.2989>.
- Nurliasari, K. E., & Achmad, T. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9 (1), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *POJK Nomor 57/POJK.04/2017: Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek*.
- Potipiroon, W., & Wongpreedee, A. (2020). Ethical Climate and Whistleblowing Intentions: Testing the Mediating Roles of Public Service Motivation and Psychological Safety Among Local Government Employees. *Public Personnel*

Management, 50 (3), 327-355. <https://doi.org/10.1177/0091026020944547>
(Original work published 2021).

- Putri, U. R., Dwiharyadi, A., & Handayani, Desi. (2024). Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System terhadap Potensi Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1 (4), 29–41. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.461>.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10 (1), 1-18. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1427>.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5 (1), 84-105. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24275>.
- Rahmi, M., Fitri, S. A., Putra, Y. E., Masdar, R., & Marlin, K. (2024). Peran Independensi Auditor Internal dan Whistleblowing system dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4097>.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System dan Sistem Pengendalian Gratifikasi terhadap Pencegahan Fraud pada Sektor Publik Yang Dimoderasi oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9 (2), 105–122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>.
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate Governance and Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Financial Crime*, (29) 3, 1009-1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>.
- Sinarti, A., & Nuraini, R. I. (2019). The Effect on Financial Stability, External Pressure, and Ineffective Monitoring of Fraudulent Financial Statement. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 377. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.6>.
- Sugita, S., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3 (7). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i7.950>.
- Suprpto, F. M., & Agustia, D. (2023). The Analysis of Fraudulent Financial Statements Prevention Using Hexagon's Fraud and Government Internal Auditor as Moderating Variable in Local Government in Indonesia. *Forum for Development Studies*, (50) 3, 513-537. <https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2232365>.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2 (1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>.

- Utami, R. R., Murni, Y., & Azizah, W. (2022). Pengaruh Financial Target, Ineffective monitoring, Pergantian Auditor, dan Perubahan Direksi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 9 (2), 99. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v9i2.572>.
- Wahyudi, I., Boedi, S., & Kadir, A. (2022). Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent) Sektor Tambang di Indonesia. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13 (2), 180–190. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.180-190>.
- Wahyudi, M. A., & Dewayanto, T. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12 (3).
- Wareza, M. (2019, March 29). *Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-pengelembungan-dana>